

ABSTRAK

Perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya terkait PPh Pasal 21, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi perekonomian terkini. Kebijakan terbaru yang dituangkan dalam PP 58 Tahun 2023 menjadi perhatian karena berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh pegawai maupun dipotong oleh pemberi kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang sebelum dan setelah diberlakukannya PP 58 Tahun 2023 di BRMP Sayuran Lembang dan bagaimana respons wajib pajak serta pemotong pajak di BRMP Sayuran Lembang terhadap perbedaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai BRMP Sayuran Lembang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun metode sensus yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Paired Sample t-Test (Uji T) dengan menggunakan bantuan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bpajak terutang 2023 dan pajak terutang 2024. Kebijakan PP 58 Tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan terhadap besaran pajak yang terutang. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya penyesuaian perencanaan pajak baik bagi wajib pajak maupun pemotong pajak agar dapat memahami, mengantisipasi, dan menyesuaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PP No. 58 Tahun 2023, Pajak Terutang, Analisis Perbandingan

ABSTRACT

Changes in tax regulations in Indonesia, particularly those related to Income Tax (PPh) Article 21, are part of the government's efforts to create a fairer tax system that aligns with current economic conditions. The latest policy stipulated in Government Regulation (PP) No. 58 of 2023 has attracted attention as it directly affects the amount of tax payable by employees and withheld by employers. The purpose of this study is to examine and analyze the differences in the amount of Income Tax (PPh) Article 21 payable before and after the enactment of PP No. 58 of 2023 at BRMP Sayuran Lembang, as well as to explore the responses of taxpayers and tax withholders at BRMP Sayuran Lembang regarding these differences. This research employs a descriptive quantitative method with a quantitative approach. The population consists of all BRMP Sayuran Lembang employees subject to Income Tax Article 21. The sampling technique used is a census, in which the entire population serves as the research sample. Data analysis was carried out using the Paired Sample t-Test with the assistance of SPSS version 26. The results indicate that there is a significant difference between the amount of tax payable in 2023 and 2024. The implementation of PP No. 58 of 2023 has a significant impact on the amount of income tax payable. The implication of this study is the need for proper tax planning adjustments by both taxpayers and tax withholders to better understand, anticipate, and align their tax obligations with the prevailing regulation.

Keywords : Income Tax, Article 21 Income Tax, Government Regulation No. 58 of 2023, Tax Payable, Comparative Analysis